

Banjir-Longsor di Sumut Meluas

Dari Halaman 1

Ferry Walintukman mencatat terjadi 86 bencana yang meliputi 59 tanah longsor, 21 banjir, 4 pohon tumbang, dan 2 puting beliung.

"Bencana ini menimbulkan 72 korban terdampak, dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 37 luka ringan, 6 luka berat, dan 5 orang masih dalam pencarian. Sejumlah daerah dengan dampak terbesar meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Tengah," ujarnya, Rabu (26/11).

Ferry mengatakan, Polda Sumut mengerahkan total 492 personel yang terdiri dari 352 personel Satbrimob Polda Sumut, 121 personel Dit Samapta Polda Sumut, 11 personel Bid Dokkes Polda Sumut, 8 personel Bid TIK Polda Sumut.

"Personel tersebut telah disebar ke titik-titik bencana untuk melakukan evakuasi warga terdampak, pencarian korban yang belum ditemukan, penga-

manan dan pengaturan lalu lintas di lokasi longsor, penanganan bencana alam hingga pembersihan material longsor dan membantu membuka akses jalan," ujarnya.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mencatat 20 bencana dengan total 49 korban, Polri dan tim gabungan masih fokus melakukan pencarian satwa warga yang belum ditemukan.

Sementara di Kota Sibolga yang mencatat 12 korban jiwa, tim SAR gabungan terus menyisir area longsor yang dinilai masih berpotensi bergerak akibat hujan lanjut.

"Berdasarkan analisa, rangkaian bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi hampir tanpa jeda selama beberapa hari terakhir. Di beberapa titik banjir, ketinggian air masih mencapai 1 meter, sementara hujan intensitas sedang-lebat masih terpantau di sebagian wilayah Sumut," katanya.

Polda Sumut juga menerima laporan adanya

potensi longsor susulan di sejumlah daerah berbukit seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, dan Mandailing Natal.

"Sejak hari pertama, seluruh jajaran Polda Sumut langsung turun ke lapangan. Fokus kami adalah menyelamatkan warga, melakukan evakuasi, dan membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Polri hadir sepuhun hati untuk masyarakat," ujarnya.

Ferry menambahkan, sinergi Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan.

"Kami terus berkoordinasi dengan BPBD dan stakeholder lain untuk percepatan penanganan, termasuk pencarian korban, pendirian posko darurat, dan distribusi bantuan. Situasi masih dinamis, sehingga kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas," katanya.(A-10)

Brimob Amankan Lokasi Banjir

Dari Halaman 1

hingga kawasan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Intensitas hujan yang tinggi sejak malam sebelumnya membuat kontur tanah menjadi lalib, sehingga memicu longsor yang menutup sebagian badan jalan di area Pasar Sipirok. Lumpur, batu, dan material perekonomian yang terbaru arus menyulitkan kendaraan melintas dan membuat aktivitas ekonomi warga terganggu.

Melihat kondisi tersebut, Komandan Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Muhibbin, langsung memimpin jalannya operasi

SAR. Kehadiran beliau di lapangan menambah semangat personel yang bekerja keras membersihkan material longsor dan mengurai arus kendaraan yang tertahan.

Dengan peralatan pendukung dan pengarahan personel terampil, tim Brimob melakukan penyisiran area rawan, memastikan tidak ada warga yang terjebak, serta mengevakuasi material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kerja sama dengan unsur pemerintah setempat dan masyarakat mempercepat proses penanganan hingga situasi berangsur pulih.

Upaya yang dilakukan tidak hanya terfokus pada pembukaan jalan, tetapi juga penanganan banjir bandang yang mengalir ke kawasan

pasar. Personel Brimob turut membantu normalisasi aliran air agar tidak kembali meluap dan mengganggu kegiatan masyarakat.

Setelah beberapa jam bekerja di tengah kondisi medan yang sulit, akses jalan akhirnya dapat dibuka kembali dan kembali aman dilewati kendaraan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, aman, dan tanpa kendala berarti.

Aksi cepat Brimob di lokasi bencana ini menjadi bukti bahwa keberadaan Satuan Brimob bukan hanya sebagai garda keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan kemanusiaan yang siap hadir di saat masyarakat membutuhkan pertolongan.(A-10)

Nezar Djoeli Minta Pemerintah Pusat Lakukan

Dari Halaman 1

hukum dilakukan terhadap para perambah," tegasnya.

La menambahkan, banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga, merupakan alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan. Katanya, tanpa penanganan cepat, wilayah pesisir barat Sumut akan terus berada dalam ancaman bencana serupa kedepan.

"Ini bukan kejadian pertama. Setiap tahun masyarakat selalu dihantui banjir dan longsor. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata,

bukan hanya pernyataan," ujar Nezar.

Dirinya juga mendorong Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/ kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk bergerak bersama melakukan audit lingkungan dan penindakan terhadap para pelaku illegal logging maupun pembukaan lahan tanpa izin.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan tunggu lebih banyak korban jatuh baru pemerintah bertindak," tutupnya.

Nezar pun berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang terdampak banjir bandang, bergerak cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

"Wilayah terdampak tidak boleh menunggu perintah pusat atau provinsi lagi. Evaluasi warga yang terjebak bencana harus dilakukan secepat mungkin. Setiap detik sangat berharga, dan keterlambatan justru bisa menambah jumlah korban," tegaskan.

Nezar menekankan, koordinasi lintas instansi harus dipercepat, mulai dari BPBD, TNI-Polri, hingga relawan agar proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat berjalan optimal.(A-10)

Distribusi BBM Terganggu

Dari Halaman 1

di beberapa lokasi masih dapat terjadi," ujar Fahrooui dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).

Perusahaan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat, dan instansi penanganan kebencanaan untuk memastikan jalur distribusi aman dilalui serta mendukung percepatan pembersihan material longsor.

"Pola penyaluran disesuaikan melalui mekanisme alih suplai Regular-Alternative-Emergency (RAE), termasuk optimalisasi suplai BBM untuk SPBU di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara yang didukung dari IT Teluk Kabung, FT Dumai, dan IT Medan Group untuk produk Pertalite, Pertamax, Biosolar, dan Dexlite," jelasnya.

Fahrooui menambahkan untuk penyaluran energi ke wilayah Tapanuli Utara dan sekitarnya tetap terkoordinasi pasca terjadinya longsor yang menutup badan Jalan Lintas Sibolga-Tarutung pada Selasa (25/11/2025) pagi.

"Material longsor berupa tanah dan perekonomian menutup badan jalan sehingga jalur distribusi dari Fuel Terminal (FT) Sibolga ke sejumlah SPBU di Tapanuli Utara dan kabu-

paten sekitarnya untuk sementara tidak dapat dilalui mobil tangki," sebutnya.

Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan perusahaan transportir untuk melakukan penyesuaian rute distribusi dan pengaturan suplai BBM agar penyaluran tetap dapat dikelola optimal sesuai kondisi akses yang tersedia.

"Informasi terbaru menunjukkan alat berat telah dikerahkan ke lokasi untuk percepatan pembersihan material longsor dan pembukaan jalur, sehingga kendaraan diharapkan dapat segera kembali melintas," paparnya.

Sementara itu, untuk penyaluran energi, khususnya LPG dan BBM, di wilayah Tapanuli Tengah, juga terkendala. Banjir menyebabkan sebagian akses jalan diberlakukan sistem buka tutup sehingga laju kendaraan melambat dan berpotensi menimbulkan penyesuaian waktu tempat distribusi.

"Di sektor LPG, terdapat pangkalan yang terdampak dan telah dipindahkan sementara ke lokasi yang lebih aman guna menjaga kelancaran dan keamanan distribusi," sebutnya.

Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan agen LPG, pangkalan di sekitar lokasi, SPBE, serta lembaga terkait untuk memastikan suplai tetap berjalan dan tidak terjadi gangguan signifikan terhadap ketersediaan LPG dan BBM

bagi masyarakat.

"Pemantauan suplai dan kondisi akses jalan dilakukan secara intensif sambil menunggu situasi banjir berangsur normal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, membeli LPG dan BBM sesuai kebutuhan," jelasnya.

Bencana banjir dan longsor melanda 6 kabupaten/kota di Sumatra Utara (Sumut) akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir. Keenam daerah itu yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan tercatat 20 kejadian bencana, terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Peristiwa ini menyebabkan 19 warga menjadi korban, dengan rincian 10 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 orang masih dalam pencarian.

"Dampak kerusakan juga cukup luas, yaitu 2.393 kepala keluarga terdampak kerusakan rumah dan 445 warga harus mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama masih tertutup material longsor," ujarnya, Selasa (25/11/2025). (cnni/js)

80 Pesantren Rawan Ambruk

Dari Halaman 1

terulang kembali.

"Presiden langsung memberikan instruksi itu harus diperbaiki sebelum terjadinya korban. Ya, dan inilah kita bersyukur presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren," katanya.

Sementara soal Tragedi Al Khoziny sendiri, Menag mengaku sudah meninjau langsung di lokasi kejadian. Pihaknya juga memberikan bantuan darurat, hingga berkolaborasi dengan kementerian lain untuk melakukan penanganan.

"Maka itu kami kerjasama atas arahan bapak presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan," katanya.(cnni/js)

Siapa yang Mengendalikan Bank Sumut?

Dari Halaman 1

kekuasaan. Sahamnya dipegang kabupaten dan kota. Suaranya ditentukan kepala daerah. Arah kebijakannya kerap mengikuti angin politik, bukan kebutuhan rakyat kecil. Maka pergantian direksi bukan sekadar evaluasi kinerja. Ia adalah sinyal dari para pemilik suara terbesar.

Kita ingat, beberapa pekan sebelum RUPSLB, kasus kredit bermasalah kembali menyeruak. Seorang analis ditahan. Nama pejabat lama ikut terseret. Bisik-bisik soal manipulasi dokumen beredar di lorong kantor cabang. Publik melihat Bank Sumut seperti rumah yang lantainya terus bergetar, tapi gentengnya justru diganti lebih dulu. Mengapa pergantian direksi dilakukan sebelum ada audit terbuka atas masalah kreditnya?

Pertanyaan itu penting. Karena arah bank

ditentukan oleh tangan yang mengatur dari balik tirai. Jika pergantian direksi dilakukan untuk memperkuat tata kelola, publik senang. Tetapi jika ini justru bagian dari perintah kursi demi kenyamanan pihak tertentu, maka Bank Sumut sedang berada di jalan yang salah. Kita tak sedang membicarakan lembaga kecil. Kita sedang membicarakan bank yang memegang uang rakyat dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Utara.

Di lapangan, pedagang kecil masih menunggu akses kredit. UMKM harus mengumpulkan berkas yang tak relevan. Sementara kredit konsumtif terus mengalir karena lebih aman bagi laporan keuangan. Jika kebijakan kredit tetap seperti itu, siapapun direksinya, wajah bank ini tak akan berubah. Maka, makna dari pencopotan dua direksi itu hanya bisa dijawab dengan satu cara, apakah orientasi kredit berubah atau tetap

seperti kemarin.

Bank Sumut membutuhkan pemimpin yang berdiri tegak, bukan yang menunduk kepada pemegang saham terbesar. Ia membutuhkan keberanian untuk mengembalikan mandatnya yakni menggerakkan ekonomi rakyat, bukan sekadar membesarkan angka dividen. Tanpa itu, RUPSLB hanya menjadi panggung pergantian pemain, bukan pemberantasan struktur.

Pada akhirnya, publik berhak tahu apakah keputusan besar di bank ini lahir dari nalar bisnis atau dari bisikan kekuasaan? Jika suara politik masih lebih keras daripada suara pasar, maka apa pun hasil RUPSLB kemarin hanya akan menghasilkan pemimpin baru dengan masalah lama.

Bank Sumut mestinya kembali ke arah semula. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi bank daerah yang kehilangan daerahnya.

TNI Siapkan

Dari Halaman 1

Tengah.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianza mengatakan TNI siap mendukung langkah pemerintah dalam memastikan aspek pertahanan dan keamanan negara.

"TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpsasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu objek vital nasional dan TNI siap mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara," kata Freddy saat dihubungi, Rabu (26/11).

Freddy juga menjelaskan saat ini TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan.

"Termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan bandara yang tak punya perangkat negara adalah anomali.

Ia bilang pihaknya akan segera mengevaluasi masalah tersebut sehingga celah kerawanan kedaulatan ekonomi bisa teratasi.

"Ini anomali, bandara tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11).

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Sementara itu, Head of Media Relations PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan bandara tersebut secara resmi telah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemhub).

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedy dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Kendati demikian, Dedy enggan menjelaskannya lebih lanjut. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini kami menyarankan rekan media untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Badan Otoritas Bandara wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional bandara Imip," ucapan dia.(cnni/js)

